

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

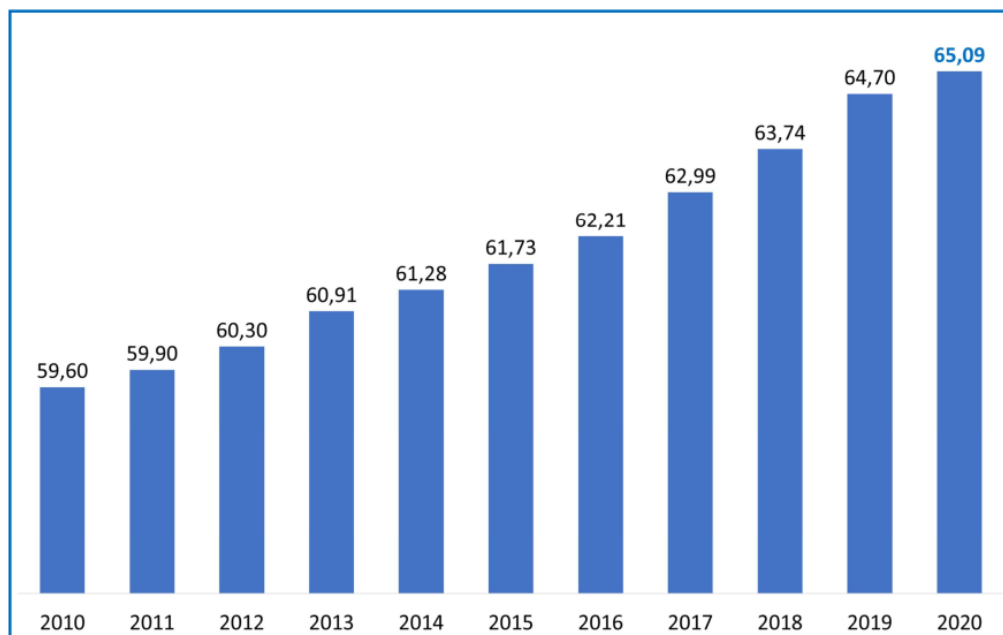
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; ayat (3) menyatakan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Uraian pasal 5 tersebut kemudian dipertegas dengan pasal 32, ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar yuridis formal sebagai payung hukum sekaligus mandat bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan dalam memperoleh hak pendidikannya.

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang sampai saat ini masih belum memperoleh akses pendidikan menengah yang baik, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Oleh karenanya ketertinggalan di berbagai aspek kehidupan dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah, seringkali dijumpai dan menyisakan masalah besar. Kondisi infrastruktur pendidikan yang masih terbatas di

pedalaman menyebabkan akses pendidikan semakin tidak merata dan melahirkan kebodohan dan kemiskinan.

Gambar 1. 1

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Nasional 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2020

IPM digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Provinsi Papua secara umum telah mengalami kemajuan dalam satu dekade terakhir. IPM Provinsi Papua Barat meningkat dari 59,60 pada tahun 2010 menjadi 64,70 pada tahun 2019. Selama dekade tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,92 persen per tahun dan meningkat dari level “rendah” menjadi “sedang” sejak tahun

2012. Pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Papua Barat. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2020 tercatat sebesar 65,09 atau tumbuh 0,60 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Melalui pencapaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Papua Barat dari tahun 2010 sampai 2020 menjadi sebesar 0,89 persen per tahun.

Pemerataan dan keterbukaan akses pendidikan sangat penting untuk memperkuat kekuatan dan kesatuan bangsa. Keutuhan berbangsa tercermin dari tingkat pendidikan yang merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Latar belakang pendidikan yang masih lemah di salah satu bagian wilayah, menyebabkan lemahnya kekuatan rantai persatuan sebagai bangsa. Melalui peningkatan akses dan penuntasan pendidikan di tingkat menengah bagi daerah yang masih lemah dibidang pendidikannya, menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan layanan dan akses pendidikan bagi lulusan SMP atau yang sederajat pada tingkat pendidikan menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun yang bertujuan memberikan kesempatan kepada lulusan SMP atau yang sederajat agar melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Dalam program keberpihakan di bidang pendidikan telah dituangkan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan berlaku juga untuk Papua Barat sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa “setiap penduduk berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya”. Amanat yang terdapat pada UU 21 Tahun 2001 diwujudkan dalam Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat.

Kesetaraan serta keterbukaan akses pendidikan sangat penting dalam memperkuat kekuatan dan kesatuan bangsa. Pendidikan Layanan Khusus untuk Papua dan Papua Barat ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pendidikan Layanan Khusus. Peraturan Menteri ini menjadi landasan hukum Afirmasi Pendidikan tersebut maka melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pendidikan Layanan Khusus menjadi dasar hukum Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Nomor 5443/D/DM/2015; Nomor 723.1/B/SK/2015; Nomor 420/5404/OTDA; Nomor 420.1/12584/SET; Nomor 421.4/1789/GPB/2015 tentang Program Afirmasi Pendidikan Menengah dan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat. Program Afirmasi Pendidikan Menengah

ini sudah dimulai sejak tahun 2013 dan masih berlangsung sampai sekarang.

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat merupakan bentuk pendidikan layanan khusus yaitu dengan mentransfer siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Provinsi Papua dan Papua Barat ke 6 Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pelaksanaan program ADEM Papua dan Papua Barat bagi siswa/i yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan dan pemihakan kepada mereka untuk dapat menerima layanan pendidikan menengah yang berkualitas dalam rangka akulturasi keragaman budaya di Indonesia. Program ADEM Papua dan Papua Barat dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pendidikan layanan khusus kepada putra-putri yang berasal dari Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan sumber daya manusia. Penerapan program ADEM di sekolah-sekolah penerima diatur sesuai dengan kekhasan layanannya. Siswa penerima program ADEM yang telah lolos seleksi akan mendapatkan layanan berupa penjemputan dari wilayah asal mereka ke luar wilayah yang telah ditetapkan. Siswa penerima program ADEM akan mendapatkan fasilitas berupa uang saku, tempat tinggal serta perlengkapan belajar dari seragam hingga alat tulis. Selain itu sebagian besar bentuk layanan pendidikan yang diberikan sama dengan peserta didik reguler.

Merujuk kepada Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat

Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/C6/PD/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Lanjutan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat Tahun 2020, tertulis bahwa tujuan dari pelaksanaan program ADEM adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat usia sekolah menengah yang terkendala oleh hambatan geografis dan ekonomi; meningkatkan minat dan motivasi anak sekolah menengah yang terkendala oleh hambatan geografis dan ekonomi; mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia di provinsi yang memiliki kendala hambatan geografis dan ekonomi dalam hal mengakses pendidikan.

Hasil yang diharapkan dalam program ADEM adalah terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu melalui implementasi program ADEM; terlaksananya upaya dalam mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun melalui implementasi program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM); meningkatnya motivasi belajar siswa yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah melalui program ADEM; terlaksananya upaya dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia di provinsi yang memiliki kendala hambatan geografis dan ekonomi dalam hal mengakses pendidikan (Widayanti & Jumintono, 2021).

Tabel 1.1

Data Siswa Aktif dan Jumlah Sekolah Program ADEM Papua dan Papua Barat Tahun Ajaran 2019/2020

No	Provinsi	Jumlah Sekolah	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
1.	Bali	26	54	51	41	146
2.	Banten	26	70	66	65	201
3.	DIY	19	35	38	33	106
4.	Jawa Barat	29	88	94	93	275
5.	Jawa Tengah	32	66	54	63	183
6.	Jawa Timur	51	137	133	132	402
Total		183	450	436	427	1313

Sumber: Laporan ADEM 2020

Pada tabel 1.1 merupakan data siswa aktif tahun ajaran 2019/2020 yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat keempat dengan jumlah sekolah terbanyak sebagai penerima siswa Program ADEM. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat keempat dengan jumlah siswa sebesar 183.

Tabel 1.2

**Sekolah Penerima Program Adem Papua Dan Papua Barat Di Jawa Tengah
Tahun Ajaran 2020/2021**

No	Nama Sekolah	Kota	Jumlah Siswa
1.	SMA N 3 CILACAP	Kab. Cilacap	2
2.	SMA N 1 NGEMPLAK BOYOLALI	Kab Boyolali	2
3.	SMA N 2 DEMAK	Kab. Demak	2
4.	SMA N 1 KARANGPANDAN SOLO	Kab. Karanganyar	2
5.	SMA N 1 TOROH GROBOGAN	Kab. Grobogan	2
6.	SMA N 1 KARANGGEDE BOYOLALI	Kab. Boyolali	2
7.	SMA N 1 BAE KUDUS	Kab. Kudus	2
8.	SMA KRISTEN INDONESIA	Kota Magelang	8
9.	SMA KRISTEN SATYA WACANA	Kota Salatiga	8
10.	SMA KATOLIK PENDOWO	Kota Magelang	14
11.	SMA TRISULA KENDAL	Kab. Kendal	5
12.	SMA N 1 KAYEN PATI	Kab. Pati	2
13.	SMK N 2 CILACAP	Kab. Cilacap	2
14.	SMK N 2 DEMAK	Kab. Demak	2
15.	SMK N 1 KEDAWUNG SRAGEN	Kab. Sragen	2
16.	SMK PGRI 2 KUDUS	Kab. Kudus	3
17.	SMK N 1 WONOGIRI	Kab. Wonogiri	1
18.	SMK N 2 PURWODADI	Kab. Grobogan	2
TOTAL			63

Sumber: Laporan Program ADEM Provinsi Jawa Tengah 2020

Berdasarkan tabel 1.2 sekolah penerima Program Adem Papua Dan Papua Barat di Jawa Tengah tahun ajaran 2020/2021, SMA Katolik Pendowo menjadi sekolah penerima peserta Program ADEM terbesar di Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan program ADEM terdapat kendala yang ditemukan. Peserta program ADEM datang dari daerah dan lingkungan yang secara geografis,

sosial, budaya, dan ekonomi yang jauh berbeda dengan lingkungan baru tempat mereka mengikuti pendidikan sehingga untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru diperlukan bimbingan dari berbagai pihak yakni sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi selaku penanggungjawab pelaksana Program ADEM. Terdapat kesenjangan antara kualitas pendidikan yang didapat dari sekolah sebelumnya dengan sekolah yang mereka jalani sekarang. Hal tersebut menjadi kendala yang salah satunya dapat menghambat kelancaran dari kegiatan proses belajar. Selain itu permasalahan lainnya siswa peserta program ADEM mengalami *culture shock* dengan budaya setempat, mengalami sakit saat ditengah melaksanakan pendidikan hingga perilaku menyimpang yang dapat menghambat keberhasilan mereka.

Tabel 1.3
Siswa/i Program ADEM Papua dan Papua Barat yang Telah Lulus dan *Drop Out*

Provinsi Asal	Tahun Kelulusan				Siswa <i>Drop Out</i>	Jumlah
	2016	2017	2018	2019		
Papua	412	406	422	433	484	1673
Papua Barat						
Jumlah	412	406	422	433	484	1673

Sumber: Laporan Program ADEM 2020

Pada tabel 1.3, dari tahun 2016 sampai 2019 terdapat 1189 siswa yang telah lulus dan sebanyak 484 siswa *drop out*.

Mardiasmo (2017:134) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuannya maka dapat dikatakan organisasi telah berjalan efektif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas tentang bagaimana pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, peneliti ingin mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan di SMA Katolik Pendowo Magelang dengan mengambil sebuah judul penelitian **“Efektivitas Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat efektivitas Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil maupun sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas Program ADEM Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan di SMA Katolik Pendowo Magelang.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu administrasi publik terutama dalam mengukur efektivitas suatu program serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait topik dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran terhadap dunia praktis yang diperoleh selama masa kuliah.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai efektivitas program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) di SMA Katolik Pendowo Magelang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian yang menghubungkan variabel penelitian berdasarkan pendapat dan hasil penelitian terdahulu dibarengi dengan usaha penulis untuk mencari perbandingan penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk membantu penulis menentukan sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Penulis akan mengangkat beberapa penelitian untuk dijadikan referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.3
Literature Review

No	Judul, Penulis dan Jurnal	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Panggabean, Herta Triana. (2018) :	Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas implementasi program ADEM. Penelitian	- Keseluruhan efektifitas implentasi program Afirmasi Pendidikan Menengah Papua dan Papua Barat sudah efektif dengan catatan perlu

	<p>Efektivitas Implementasi Program Afirmasi Pendidikan Menengah Papua dan Papua Barat di Kota Bandung. <i>Doctoral Dissertation.</i></p>	<p>menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>dilakukan peningkatan dalam beberapa hal yakni peningkatan monitoring dan pengawasan terutama pada proses rekrutmen dan seleksi, ketepatan waktu penyaluran bantuan belajar dan penambahan dana bantuan belajar untuk kegiatan di luar sekolah kegiatan pada masa libur.</p> <p>- Beberapa permasalahan yang utama ditemukan di lapangan yaitu terkait rekrutmen dan pemberian layanan dan fasilitas. Kendala yang di temukan dalam proses rekrutmen dan seleksi misalnya Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dapat memastikan apakah proses rekrutmen di sebagian kabupaten/kota benar-benar dilaksanakan oleh semua dinas kabupaten/kota. Penyebabnya adalah</p>
--	---	---	---

			akibat faktor geografis yang jauh dan sulit dilalui dan dana untuk melakukan pengawasan dan monitoring. Akibat proses rekrutmen dan seleksi yang salah menjadi kendala dalam proses belajar mengajar.
2.	<p>Ni'matuzahoh dan Syakarofath, Nandy Agustin.</p> <p>(2019) :</p> <p><i>Identification of Implementing Secondary Education Affirmation Program (ADEM) in Education Board Region at East Java Province.</i></p> <p><i>Advances in Social Science, Education and Humanities</i></p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan untuk menemukan hambatan untuk menemukan solusi alternative dalam implementasi Program ADEM di Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>- Pelaksanaan Pendidikan Menengah Program Afirmasi ADEM di Papua dan Papua Barat dalam Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai kendala dalam berbagai bidang termasuk: regulasi dan mekanisme pelaksanaan program yang meliputi sosialisasi, proses kemahasiswaan seleksi dan penempatan, kendala yang dihadapi mengelola sekolah, yaitu ketidaksiapan siswa, keuangan dan sumber daya.</p>

	<i>Research (ASSEHR), volume 304</i>		
3.	Kambuaya, Carlos. (2015) : Pengaruh Motivasi, Minat, Kedisiplinan Dan Adaptasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah Asal Papua Dan Papua Barat Di Kota Bandung. <i>SHARE: Social Work Jurnal</i> <i>Vol 5 No 2, 157-166.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel motivasi, minat, kedisiplinan dan adaptasi diri terhadap prestasi belajar siswa peserta program ADEM, serta menganalisis variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap prestasi belajar siswa peserta program ADEM asal Papua dan Papua Barat di Kota Bandung.	Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, artinya bahwa variabel bebas yang terdiri dari variabel motivasi, minat, kedisiplinan dan adaptasi diri jika dihubungkan secara bersama-sama (silmultan) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa Papua dan Papua Barat yang mengikuti Program Afirmasi Pendidikan Menengah di Kota Bandung
4.	Ralahalu, Stefany Gabriella.	Tujuan penelitian ini utnuk mengetahui hambatan	- Hambatan komunikasi antara guru dan siswa Papua program ADEM

	<p>(2017) : Hambatan Komunikasi Antarbudaya Antara Guru Dan Siswa Papua Program Adem Di SMA Immanuel Batu. <i>JURNAL E-KOMUNIKASI.</i></p>	<p>komunikasi antarbudaya antara guru dan siswa program ADEM di SMA Immanuel Batu.</p>	<p>adalah hambatan bahasa, hambatan non verbal dan hambatan perbedaan budaya pendidikan. Hambatan bahasa timbul karena meskipun keduanya menggunakan Bahasa Indonesia, namun ada perbedaan aksen atau lafal dan dialek. Selain hambatan bahasa, Guru dan siswa Papua juga memiliki hambatan non verbal yaitu perbedaan makna kontak mata. Siswa Papua yang tidak terbiasa dengan sistem pembelajaran di SMA Immanuel yang menuntut siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran juga menjadi hambatan dalam komunikasi antara guru dan siswa Papua</p>
<p>5.</p>	<p>Nanang Eko Yulistyan, Tri Joko Raharjo, dan Moh Yasir Alimi.</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola interaksi siswa peserta</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola interaksi sosial mahasiswa Papua di SMA Negeri 3 Purwokerto</p>

	<p>(2019) : <i>Patterns of Social Interaction of Papuan Students (Case Study at Public Vocational High School 2 Purwodadi, Grobogan Regency).</i></p>	<p>Program ADEM Papua di SMK 2 Purwodadi Grobogan, mengidentifikasi kendala interaksi sosial siswa Peserta Program ADEM Papua dan menganalisis strategi sekolah dalam mendorong proses interaksi sosial siswa Program ADEM Papua di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purwodadi.</p>	<p>Sekolah 2 Purwodadi secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun beberapa kendala harus segera dicari solusinya. Harapan yang ingin dicapai adalah terjadinya hubungan yang harmonis dan sinergis dalam proses interaksi sosial sehingga mendukung program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah.</p>
<p>6.</p>	<p>Pujiasih, Dwiana. (2020) : Adaptasi Sosial Budaya Siswa Asal Papua (Studi pada Peserta Program Afirmasi Pendidikan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara siswa Papua menghadapi lingkungan baru selama mereka mengikuti Program ADEM dan bagaimana</p>	<p>- Proses adaptasi sosial budaya di lingkungan sekolah dilakukan dengan melakukan interaksi dengan guru, sesama siswa dan semua pegawai di lingkungan sekolah, namun demikian interaksi yang</p>

	<p>Menengah di SMA Negeri 3 Purwokerto). <i>Jurnal Sosial Soedirman</i>, 1-17.</p>	<p>mereka menyelesaikannya di SMA Negeri 3 Purwokerto. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian siswa SMA Sekolah 3 Purwokerto.</p>	<p>dilakukan siswa Papua lebih sering bersifat pasif.</p> <p>- Siswa asal Papua mengalami berbagai hambatan sosial budaya dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Hambatan tersebut berupa minimnya pengetahuan awal tentang informasi SMA Negeri 3 Purwokerto dan rendahnya status sosial ekonomi orang tua, perbedaan bahasa, perbedaan makanan, adanya stereotipe dan diskriminasi dan rindu kampung halaman (homesick).</p>
--	--	---	--

Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai sumber

Pada penelitian terdahulu diatas, peneliti mengambil enam contoh yang berkaitan dengan pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat. Dari keenam contoh hasil penelitian di atas, dapat dilakukan analisa persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian–penelitian terdahulu yaitu pada fokusnya yang sama-sama membahas tentang pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat. Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian ini yakni lokus yang berbeda dan fokus proses dalam

Pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat. Pada penelitian ini menempatkan Pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang.

1.5.2 Administrasi Publik

Istilah administrasi awalnya berasal dari bahasa latin yakni “*ad*” yang artinya intensif dan “*ministrare*” yang artinya to *serve* (melayani) yang secara etimologi berarti melayani secara intensif yang kalau di Indonesia dikenal dengan istilah tata usaha yakni pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis (adminstasi dalam arti sempit). Administrasi dalam bahasa Inggris adalah: “*administration*” yang terdiri dari dua suku kata yakni “*administ*” dan “*ration*” yang artinya mengurus (dalam arti sempit) namun tidak jelas maknanya apakah mengurus orang atau benda.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Sawir, 2021), pengertian administrasi dalam artian sempit adalah tata usaha atau *office work* meliputi kegiatan mencatat, menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya, sedangkan menurut Siagian (dalam Oktavianti, 2016), pengertian administrasi dalam arti luas ialah sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai dasar rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian dalam Syafiie (2010: 14) mengemukakan pendapat lain bahwa administrasi adalah seluruh proses pelaksanaan atas keputusan yang telah diambil dan dilakukan oleh dua orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik ialah kerjasama yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan public secara efektif dan efisien. Dari pendapat beberapa pendapat ahli diatas kesimpulan yang dapat ditarik bahwa administrasi publik ialah kerjasama yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan publik.

1.5.3 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Menurut Yeremias T. Keban didalam bukunya yang berjudul Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori, dan Isu; menyatakan bahwa ada 6 dimensi strategis dalam konsep administrasi publik, yakni sebagai berikut :

a. Dimensi Kebijakan

Dimensi ini berupa proses penyusunan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Proses ini dianalogikan sebagai mekanisme pada otak manusia dalam memberikan arahan terhadap perbuatan.

b. Dimensi Struktur Organisasi

Dimensi ini berkaitan dengan arahan struktur termasuk pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) dalam mencapai sasaran dan target, termasuk diantaranya kekuasaan serta tanggung jawab. Proses ini memiliki peranan dan fungsinya sendiri, serta siap untuk melaksanakan tugas ketika mendapat perintah.

c. Dimensi Manajemen

Dimensi ini merupakan dimensi proses dimana bagaimana caranya agar seluruh kegiatan yang telah terancang dapat diterapkan, dirangkap, dan di monitor untuk mencapai target institusi atau lembaga berdasarkan asas-asas manajemen.

d. Dimensi Etika

Dimensi ini memberikan tuntutan adab terhadap para administrator mengenai apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan, apa yang baik ataupun tidak baik dalam mengendalikan etiket mereka.

e. Dimensi Lingkungan

Dimensi ini merupakan keadaan sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi dalam ilmu administrasi publik, yakni; dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi kebijakan, dan dimensi tanggung jawab moral. Tanpa adanya dimensi ini, maka dimensi-dimensi sebelumnya susah untuk berkembang. Dimensi ini mencakup system ekonomi, sosial, politik dan budaya serta teknologi yang mempengaruhi administrasi publik.

f. Dimensi Akuntabilitas Kerja

Dimensi ini untuk membuktikan eksistensi dan fungsi riil pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi publik di suatu negara.

1.5.4 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik merupakan cara pandang, metode, prinsip dasar, nilai serta cara memecahkan yang dianut masyarakat ilmiah di masa tertentu, hal tersebut dikemukakan oleh Thomas S.Khun. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Robert T. Golembiews (Thoha 2008: 18) yang menganggap standar suatu disiplin ilmu dapat dilihat dari fokus maupun lokusnya. Fokus membahas kajian apa (*what of the field*) atau bagaimana memecahkan suatu permasalahan, lokus membahas terkait dimana lokasi (*where of the field*) atau tempat suatu ilmu pengetahuan diterapkan.

Sampai saat ini administrasi publik telah melewati lima paradigma yang dinyatakan oleh Nicholas Henry dalam Yeremias T. Keban (2014: 8), yaitu:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Frank J Goodnow dan Leonard D White merupakan tokoh dari paradigma ini yang didalam bukunya yang berjudul *Politics and Administration* menyatakan:

- a. Fungsi politik adalah harus memusatkan perhatiannya kepada kebijakan ataupun ekspresi dari kehendak rakyat.

- b. Fungsi administrasi adalah memberi perhatian kepada atau implementasi dari kebijakan dan kehendak tersebut.

Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya, Goodnow dalam Yeremias T. Keban (2014: 32) menyatakan bahwa lokusnya berpusat kepada *Government Bureucracy*. Metode ataupun kajian yang didalam Administrasi Publik kurang dibahas secara menyeluruh (masalah politik, pemerintahan & kebijakan) yang menjadi focus dari birokrasi pemerintah.

Frank J. Goognow dan Leonard D. White merupakan tokoh yang memelopori periode paradigma ini, memaparkan bahwa politik harus berhubungan dengan kebijakan ataupun berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, sedangkan administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Hal tersebut menjadi dasar pembeda antara administrasi dan politik adalah adanya pemisahan kekuasaan. Lembaga yudikatif adalah Lembaga yang membantu Lembaga legislatif dengan kemampuan interpretasinya dalam mengekspresikan tujuan negara dan membuat kebijaksanaan, sedangkan Lembaga eksekutif melaksanakan kebijaksanaan itu secara politis dan tidak memihak.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini diawali dari kemunculan *Principles of Public Adminisration* yang merupakan karya W. F. Willoughby. Bidang lain menunjukkan beberapa kontribusi yang bermunculan pada fase ini, yakni pada bidang manajemen dan industri dimana memberikan dampak yang besar

terhadap munculnya prinsip-prinsip administrasi. Fokus kajian yang akan dibahas didalamnya adalah prinsip-prinsip administrasi publik, dimana pada prinsip tersebut penekanan dari lokus paradigmanya sendiri kurang ditekankan yang dimana pada kenyataannya prinsip tersebut dapat terjadi pada seluruh tatanan, misi, kerangka institusi, budaya dan lingkungan sehingga administrasi dapat hidup dimanapun asalkan prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Administrasi memiliki tujuh prinsip yang dipaparkan oleh Lyndall Urwick & Luther H. Gullick dengan judul *Notes on the Theory of Organization* yang merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting*). Uraian dari singkatan tersebut adalah:

a. Perencanaan (*planning*)

Sebuah proses penetapan yang secara garis besar merupakan metode dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebuah organisasi. Pendapat lain disampaikan juga oleh Malayu Hasibuan yang memaparkan bahwa *planning* atau perencanaan adalah sebuah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan sebuah pengaturan struktur dan proses organisasional yang dapat diatur, dirumuskan dan dikoordinasikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan struktur yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dirancang dalam membantu pencapaian dari tujuan yang telah dibuat dan merupakan proses dimana seseorang melaksanakan misi utama untuk mencapai tujuan.

c. Pengadaan tenaga kerja (*staffing*)

Pengadaan tenaga kerja adalah penentuan terhadap siapa saja yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dalam suatu organisasi. *Organizing* dan *staffing* memiliki perbedaan dimana *organizing* merupakan tempat untuk menyusun segala kegiatan sedangkan *staffing* kegiatan menentukan tenaga pelaksana atau menentukan personil keseluruhan yang akan menduduki tiap posisi serta memelihara kondisi tersebut.

d. Pemberian bimbingan (*directing*)

Berisi kegiatan usaha-saha dalam membimbing, memberi saran, memberi perintah dan instruksi dalam mencapai tujuan.

e. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Kegiatan dalam mengarahkan dan menyatukan suatu kegiatan dari seluruh *enchelon* suatu organisasi agar dalam pergerakan dan langkah yang dilakukan selanjutnya tertuju pada tujuan serta terjadi inteleransi dari berbagai corak kerja. *Coordinating* juga merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha yang dilakukan guna

mencapai waktu yang ditentukan dalam hasil pelaksanaan dan bersatu untuk menghasilkan suatu tujuan.

f. Pelaporan (*reporting*)

Kegiatan yang berisi laporan dari setiap kejadian, kelancaran sebuah aktivitas serta terjadinya sebuah kemajuan dari setiap kegiatan. Kegiatan *reporting* adalah tindakan yang berkebalikan dengan *directing*, dimana pada tindakan tersebut merupakan tindakan yang datang dari atas ke bawah, sedangkan pada *reporting* merupakan tindakan yang berasal dari bawah ke atas. Pada tindakan *reporting* terjadi “*two-way traffic*” yakni sebuah kegiatan eksekutif yang menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada atasan, agar tetap terjadi komunikasi yang baik sehingga dalam pelaksanaannya atasan tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, dan inspeksi..

g. Penganggaran (*budgeting*)

Allen Shick menjelaskan bahwa penganggaran memiliki tiga tujuan yakni pengawasan, manajemen dan perencanaan. Penganggaran juga merupakan fungsi yang berkaitan dengan pengendalian organisasi yang melalui perencanaan akuntansi dan fiskal. Fungsi anggaran juga dapat dibedakan berdasarkan perjalanan historisnya. Terdiri dari empat macam yaitu: fungsi perencanaan, fungsi kontrol, fungsi manajemen, dan fungsi evaluasi. Penyusunan anggaran seperti anggaran belanja

yaitu bagaimana uang tersebut dipergunakan, dalam keperluan apa, seberapa banyak yang digunakan serta sumber-sumber keuangan tersebut didapat.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Herbert Simon (*The Poverb Administration*) menjelaskan bahwa prinsip manajemen ilmiah pada POSDCORB tidak terdapat penjelasan terkait makna “Publik” dari “*Administration Public*” Simon mengatakan bahwa dalam POSDCORB tidak terdapat penjelasan terkait apa yang harus dilakukan oleh adiministrator publik dalam *decision making*, dimana kritik yang dilakukan oleh Simon tersebut dapat menghidupkan kembali perdebatan dikotomi administrasi dan politik.

Pada paradigma ini, berisi kritikan dari paradigma sebelumnya yang menolak prinsip administrasi yang universal. Administrasi negara dibangun dengan asumsi utama yang menjelaskan bahwa administrasi negara bukan merupakan sesuatu yang bebas nilai serta dapat berlaku dimana saja, namun administrasi negara dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu yang mana pada titik ini dapat terjadi persinggungan antara nilai administrasi negara disatu sisi dengan nilai politik disisi lain. John Gaus juga menyatakan secara tegas dalam Keba (2008:33) bahwa teori administrasi public juga sebenarnya merupakan teori politik.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini, berisi tentang bagaimana cara untuk mengkaji kembali terkait prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. James D. Thompson dalam (Ismail Nawawi 2009:104) menyampaikan bahwa teknologi administrasi diperlukan dalam pelaksanaan pengaturan & keteraturan negara sebagai sarana berpikir dan bertindak sehingga tugas-tugas kenegaraan dapat memberikan hasil yang dapat menguntungkan berbagai pihak. Paradigma ini juga memiliki beberapa focus yakni analisis manajemen, perilaku suatu organisasi, penerapan teknologi modern serta sistem analisis.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin Administrasi Negara:

- a. Ahli Administrasi Negara meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni.
- b. Satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijaksanaan publik.

Paradigma yang dikemukakan oleh Nicholas Henry fokus dan lokusnya jelas, yaitu berfokus pada teori administrasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Lokus pada paradigmanya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

1.5.5 Manajemen Publik

Menurut Stoner dan Wankel dalam Harbani Pasolong (2013 :82), manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi dan pengguna seluruh sumber daya organisasi lainnya demi akuntabilitas dan rasionalitas, perencanaan serta kontrol, keuangan dan penganggaran, produktivitas sumber daya manusia. Isu-isu tersebut telah memberikan tantangan sendiri bagi sekolah atau intitusi itu sendiri untuk bisa menciptakan atau menghasilkan calon manajer publik yang professional serta berkualitas tinggi dan penataan sistem manajemen yang lebih baik.

French dan Saward dalam Darmadi Sukidin (2009:242) mendefinisikan manajemen sebagai proses, aktivitas, atau studi mengenai bagaimana melaksanakan tugas dan menjamin bahwa sejumlah aktivitas yang berbeda dilaksanakan dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga suatu sasaran hasil yang didefinisikan dapat tercapai, khususnya tugas menciptakan dan mempertahankan kondisi-kondisi, yaitu sasaran hasil yang ingin dicapai oleh sebuah usaha dan dilakukan dari sekelompok orang.

Manajemen publik (*public management*) merupakan suatu spesialisasi baru dimana Woodrow Wilson yang merupakan penulis "*The Study of Administration*" di tahun 1887 dalam (Taufiqurokhman, 2018:27-39) adalah pioneer dari terbentuknya manajemen publik yang berakar dari pendekatan normatif. Wilson mengharapkan ilmu administrasi publik dapat mengarahkan perhatiannya dalam

orientasi yang dianut dalam dunia bisnis dengan langkah memperbaiki kualitas personel dalam tubuh pemerintah, metode pemerintahan serta aspek organisasi dalam pemerintahan. Ajaran-ajaran tersebut merupakan focus dalam perbaikan fungsi eksekutif didalam tubuh pemerintahan yang dinilai telah diluar kewajaran yang mengakibatkan merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan mengadopsi prinsip dari *management business*.

Administrasi publik memiliki 4 prinsip dasar yang dikemukakan oleh Wilson yang terdiri dari; pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, fungsi eksekutif sebagai fokus utama, pemerintah sebagai setting utama organisasi, serta metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik. Beberapa paradigma lainnya juga dikembangkan oleh Wilson (Taufiqurokman, 2018:27-39) juga berdasarkan hasil dari pendapat dan pemikiran dari berbagai ahli lain, manajemen publik dapat dilihat dari masing-masing paradigma, diantaranya:

1. Paradigma pertama yaitu pengembangan sistem rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi jabatan, promosi serta pensiun dilakukan dengan melibatkan pemerintah dengan harapan menjadi lebih baik, dalam pelaksanaannya manajemen SDM serta barang/jasa diharapkan akuntabel guna tercapainya tujuan dari suatu negara.
2. Paradigma kedua, mengemukakan karya dari Luther Gullick dan Lundall Urwick pada tahun 1937, yang terkait dengan pengembangan prinsip

manajemen yang diakui sebagai prinsip universal yang dikenal sebagai POSD-CORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*).

3. Paradigma ketiga, karenanya fungsi-fungsi manajemen tidak perlu diajarkan secara normatif, atau tidak perlu lagi melihat fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai sesuatu yang menyeluruh.
4. Paradigma keempat dimana kritikan dari ahli ilmu politik yang banyak tidak disetujui, membuat konsep manajemen terus dikembangkan seperti dibentuknya *Administrasi Publik & School of Business* serta *Journal Administrative Science Quarterly* di *Cornell University* yang terletak di Amerika Serikat.

Para ahli telah memaparkan berbagai pendapat yang dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen public merupakan suatu proses penerapan dari fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan dalam suatu organisasi publik yang dilakukan guna mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat.

1.5.6 Efektivitas

Efektivitas memiliki pengertian sebuah pencapaian dari hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, pengertian tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Pengertian efektivitas dalam bahasa yang lebih sederhana dengan penjelasan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah merupakan tercapainya suatu tujuan pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Pengertian efektivitas juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2017: 134) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan dimana tercapainya sebuah tujuan yang dikehendaki melalui penyelesaian suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dimana ukuran dari keberhasilan suatu organisasi tercapai apabila telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif sesuai tujuan yang telah dibuat.

Efektivitas menurut Handoko (2006) merupakan kemampuan dalam memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maulana & Rachman (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu unit dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Robbins, 1996). Hidayat (2006:34) juga mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah tercapai, di mana semakin tinggi presentase tercapainya target maka semakin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah

dicapai. Hal tersebut membuat efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana, dengan kata lain efektivitas secara umum dapat menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan (Rahadhitya & Darsono, 2015).

Sondang P. Siagian (2010:77) juga mengemukakan terkait kriteria atau ukuran mengenai efektivitas pencapaian dari sebuah tujuan yang berisi:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana, merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

1.5.7 Efektivitas Program

Dalam melaksanakan tujuan organisasi, tentunya membutuhkan sebuah program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian program yang dipaparkan oleh Arikunto (2004: 2) adalah program adalah sebuah kegiatan implementasi dan realisasi suatu kebijakan yang berjalan dalam proses yang

berkesinambungan serta terjadi dalam organisasi dengan melibatkan sekelompok orang. Pada hakekatnya, program merupakan penjabaran atau rincian dari tujuan organisasi atau sebagai suatu rumusan yang memiliki unsur penting yaitu implementasi dari kebijakan pembangunan nasional yang membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya & terjadi di dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah efektivitas diartikan bahwa seberapa jauh program mencapai sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut pendapat Makmur (2015: 6) yang menyatakan bahwa efektivitas program adalah kegiatan yang menunjukkan ketepatan antara harapan dengan hasil yang ingin dicapai, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dijalankan dengan kemampuan operasional yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan merupakan pengertian dari efektivitas program.

Suatu program dikatakan efektif apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Perumusan efektivitas program sebagai tingkat perwujudan sasaran dimana menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Salah satu penilaian atau pengukuran terkait sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat mencapai tujuan program itu sendiri. Menurut Budiani (2008: 23) ada kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program, yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau ketepatan sasaran yang dilakukan oleh peserta program tersebut. Ketepatan sasaran menurut Makmur (2011) lebih berorientasi dalam jangka pendek, dimana lebih bersifat operasional dan penentuan sasaran yang tepat baik secara individu maupun organisasi akan menentukan aktivitas organisasi, namun sebaliknya jika sasaran yang ditetapkan tidak tepat maka dapat menghambat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut.

2. Sosialisasi Program

Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana/penyelenggara program dalam memberikan informasi terkait program yang ditujukan untuk sasaran program kegiatan. Informasi yang diberikan mampu diterima dan dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang ditentukan. Dalam (Mardikonto: 2013), Wilcox menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu diawali dengan memberikan suatu informasi, dimana melalui informasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan bagi penerima informasi tersebut.

3. Tujuan Program

Suatu rencana atau hal yang ingin dicapai serta seberapa jauh kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Steers (1985: 53), Ducan mengatakan bahwa pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses, sehingga pencapaian tujuan

akhir semakin terjamin, diperlukan adanya penyusunan tahapan yang baik dalam arti penyusunan pencapaian bagian-bagiannya maupun periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

4. Pemantauan Program

Kegiatan pengawasan dan pengontrolan kepada program yang telah dilaksanakan sebelum atau setelah kegiatan dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Winardi (2010: 7) menyampaikan bahwa pengawasan meliputi beberapa tindakan seperti pengecekan dan perbandingan dari hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan, jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan maka perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara komprehensif. Menurut Muasaroh (2010: 13) dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek berikut, antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, dimana suatu lembaga dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik.

2. Aspek rencana atau program, yaitu rencana yang sudah terprogram, sehingga seluruh rencana dapat dilaksanakan maka program tersebut dapat dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, dimana efektivitas suatu program dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. Jika aturan dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, dimana suatu program dapat dikatakan efektif apabila dilihat dari sudut hasil tujuan dan program tercapai dengan kondisi yang ideal.

1.5.8 Faktor Penghambat Efektivitas Program

Faktor yang mempengaruhi efektivitas program sangat berpengaruh terhadap keberjalanan suatu program yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Keberjalanan efektivitas program itu sendiri tentunya tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong merupakan hal-hal yang dimana mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah, dan menjadi lebih dari sebelumnya. Sedangkan faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan dapat menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program menurut Hasibuan dalam Samsudin dkk (2014: 2):

1. Kualitas Aparatur

Kualitas aparatur yang dimaksud adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012) dalam buku “Pengembangan Sumber Daya Manusia” menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan.

2. Kompetensi Administrator

Rivai dalam Samsudin dkk (2014: 3) mengemukakan pendapat terkait kompetensi administrator yang merupakan kapasitas suatu individu dalam melaksanakan berbagai pekerjaan maupun tugas tertentu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Kepegawaian Negara atau Puslitbang BKN (2004), menjelaskan bahwa pada dasarnya kompetensi terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pengetahuan (*cognitive domain*), keahlian dan keterampilan (*psychomotor domain*), serta perilaku dan sikap (*affective domain*) dan ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang mempengaruhi perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

3. Sarana dan Prasarana

Kaho dalam Samsudin dkk (2014: 3) menyebutkan bahwa sarana dan prasarana memiliki arti sebagai peralatan penting yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah. Sarana merupakan hal yang digunakan untuk memperlancar serta mempermudah aktivitas & pergerakan pemerintah.

Sarana dan prasarana merupakan penunjak ataupun peralatan kerja yang menjadi bagian penting dari terselenggaranya aktivitas.

4. Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada intinya, tujuan dari pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan menjadi salah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin apakah tujuan serta tugas dalam sebuah organisasi akan terlaksana dengan baik sesuai, intruksi, rencana, kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

1.6 Operasionalisasi Konsep/Fenomena Penelitian

Efektivitas Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang adalah penilaian atau pengukuran sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam program ADEM dapat mencapai tujuan program itu sendiri. Dalam mencapai efektivitas program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang melalui berbagai proses, antara lain proses sosialisasi program, penentuan sasaran program, pelaksanaan program, proses akulturasi, dan pemantauan program.

- a. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat kepada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dalam pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat, sasaran program tersebut ialah siswa/i yang asalnya adalah dari Pulau Papua dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Penentuan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan Program ADEM Papua dan Papua Barat, sasaran program tersebut adalah siswa/i yang asalnya adalah dari Papua dan Papua Barat dengan ketentuan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria tersebut yakni tidak mampu secara ekonomi, lulus UN tahun pelajaran saat seleksi dari SMP, usia peserta, memiliki motivasi tinggi, memiliki prestasi akademik yang baik, sehat

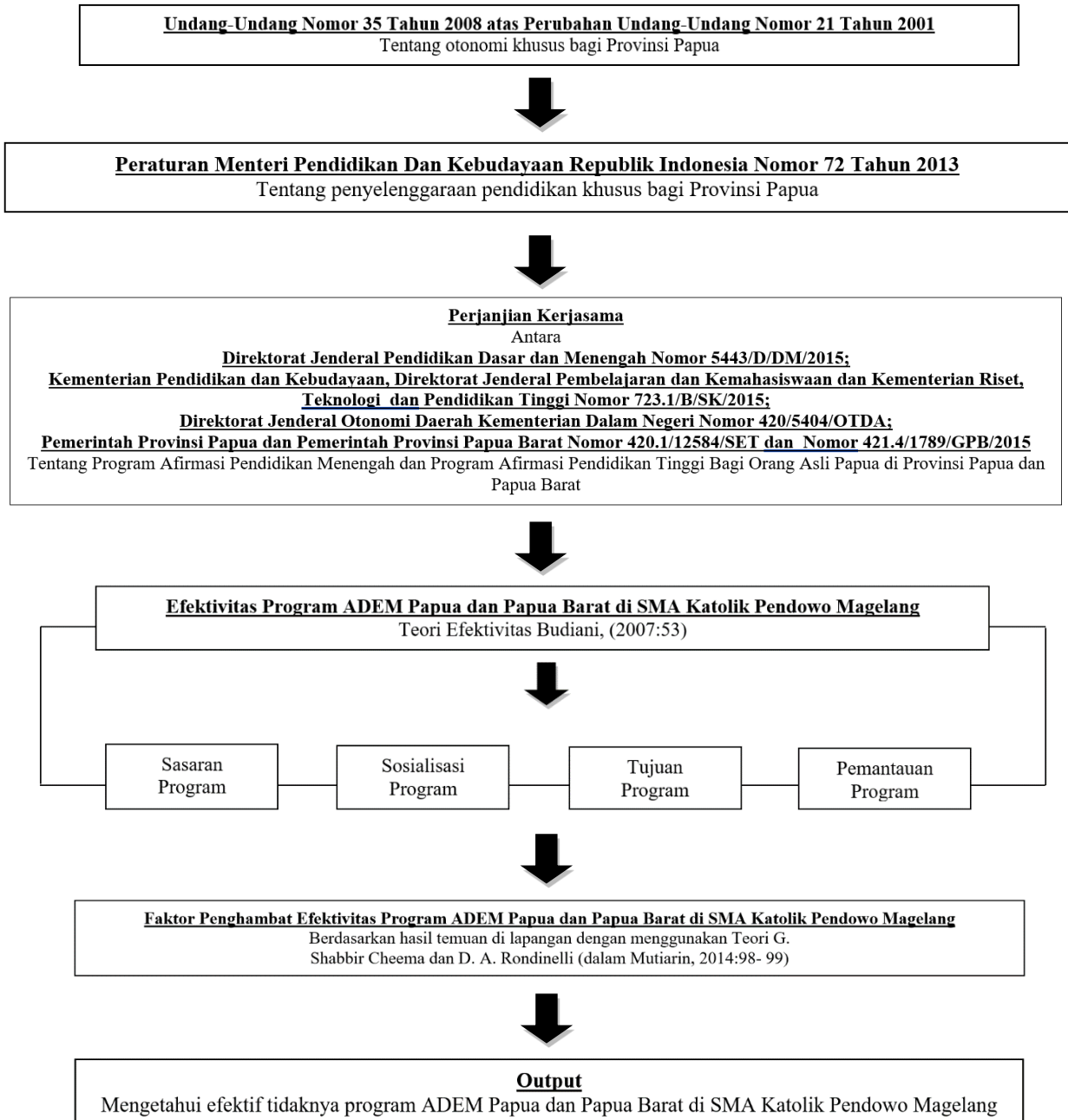
jasmani dan rohani, lulus seleksi administrasi, bebas narkoba dan tidak sedang hamil.

- c. Akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul pada kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dalam pelaksanaan program ADEM Papua dan Papua Barat, proses akulturasi yakni mempelajari kesenian daerah Jawa, mengkonsumsi makanan daerah, serta memahami Bahasa Jawa dan kebiasaan di lingkungan baru.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam penelitian ini pemantauan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat dilakukan untuk mengawasi keberjalanan program agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan program ini dilaksanakan untuk melihat kekurangan dan kelebihan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat untuk dijadikan bahan evaluasi guna untuk memperbaiki program agar menjadi lebih baik.

1.7 Argumen Penelitian

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebuah organisasi perlu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana langkah efisiensi dilakukan dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Efektivitas program merupakan tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang hasil yang diharapkan. Program ADEM Papua dan Papua Barat masih perlu ditinjau mengingat masih ada hambatan dalam pelaksanaannya seperti siswa yang *drop out* sekolah dan *culture shock* yang dihadapi siswa Program ADEM. Penelitian Efektivitas Program ADEM Papua dan Papua Barat ditulis untuk mengukur sejauh mana langkah efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut.

Gambar 1. 2
Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

1.8 Metode Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, situs/lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis data, dan sumber data.

1.8.1 Tipe Penelitian

Terdapat tiga model dalam format desain penelitian kualitatif menurut Bungin (2011:67), yakni format deskriptif kualitatif, kualitatif verifikatif, serta *grounded theory* yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Desain Deskriptif Kualitatif

Desain ini bertujuan untuk mengkritik kelemahan pada penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai fenomena, atau berbagai situasi realitas sosial yang terjadi dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu, sifat, ciri, karakter, tanda, model ataupun gambaran mengenai situasi, kondisi maupun fenomena tertentu. Format ini memusatkan diri kepada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena sehingga dapat amat mendalam dan kedalaman datanya dijadikan pertimbangan dalam model ini. Format deskriptif kualitatif biasanya dilakukan dalam penelitian berupa bentuk studi kasus yang merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang variabel sosial.

2. Desain Kualitatif Verifikatif

Desain ini merupakan upaya pendekatan induktif terhadap proses penelitian yang akan dilakukan. Penggunaan desain ini masih jarang digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif karena beberapa faktor; penelitian kualitatif dianggap masih baru, asing, canggung dan membutuhkan waktu lebih lama, metode ini masih dianggap sulit dilakukan secara epistemologis terutama jika dilakukan oleh mahasiswa, serta masih sedikit peneliti yang telah memahami metode ini sebagai metode yang unggul dalam penelitian kualitatif.

3. Desain *Grounded Theory*

Desain yang diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss (dalam Bungin, 2011:72), desain ini dianggap sebagai reaksi tajam dan menjadi jalan keluar dari “stagnasi teori” didalam ilmu sosial dengan menitikberatkan sosiologi. Penelitian yang dilakukan dengan desain *grounded theory*, dilakukan dengan mendatangi langsung ke lapangan serta semuanya dilaksanakan di lapangan oleh peneliti itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, rumusan masalah, hipotesis serta data ditemukan langsung dilapangan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Menengah Papua Dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang. Peneliti memfokuskan objek penelitian pada efektivitas program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua Dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang terkait pelaksanaan Program Afirmasi

Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah penetapan tempat atau penelitian dimana menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan. Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah di Kota Magelang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Magelang adalah:

1. Provinsi Jawa Tengah merupakan lokasi pelaksana Program ADEM Papua dan Papua Barat dengan jumlah siswa terbesar keempat di Indonesia.
2. Di Kota Magelang terdapat siswa yang terpilih sebagai peserta Program ADEM Papua dan Papua Barat.
3. SMA Katolik Pendowo Magelang merupakan salah satu lokasi pelaksana Program ADEM di Provinsi Jawa Tengah dan sebagai sekolah dengan peserta Program ADEM terbanyak di Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek pada penelitian ini berdasarkan tema penelitian yang diteliti yaitu tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang. Maka peneliti menentukan subjek penelitiannya Koordinator Program ADEM di Jawa Tengah, guru dan siswa Penerima Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA

Katolik Pendowo Magelang. Penelitian ini dalam menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 218) teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

1.8.4 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), jenis data dibedakan menjadi dua, yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif, yakni data yang berupa kata, kalimat, dan gambar.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, skema dan gambar. Sumber data pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data primer diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara maupun pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder berisi catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet, serta sumber-sumber lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat menunjang dalam proses penelitian. “Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.” (Sugiyono,2016:83). Sehingga bisa dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas riset yang dilakukan.

b. Observasi

Observasi ialah langkah kedua dalam me pengumpulan data setelah penulis melaksanakan studi pustaka. Observasi adalah metode pengumpulan data

dengan cara melakukan pengamatan tentang kondisi yang berada di lapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti menjadi lebih menguasai tentang subyek dan obyek yang tengah diteliti.

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Metode pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri ataupun *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2015: 188). Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur dimana menurut Sugiyono (2016: 137) merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan pedoman yang digunakan hanya menggunakan poin-poin tertentu yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait, seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, guru serta peserta Program ADEM Papua dan Papua Barat di SMA Katolik Pendowo Magelang selaku pelaksana program.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2016:244) menyatakan analisis data ialah proses mencari dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246-252), teknik analisis data kualitatif sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang ada di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data merupakan bagian dari analisis data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah data direduksi dan di sajikan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab permasalahan, namun bisa jadi tidak. Permasalahan dalam penelitian kualitatif yang telah dirumuskan sejak awal masih bersifat sementara serta akan berkembang setelah penelitian dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi, hubungan kausal, hipotesis maupun teori.

1.8.8 Kualitas Data

Menurut Pasolong (2013: 174) menjelaskan bahwa dalam melakukan sebuah penelitian dapat dikatakan valid bilamana terdapat kesesuaian antara data yang diperoleh dengan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Sugiyono (2016: 267) berpendapat bahwa suatu validitas dalam penelitian kualitatif merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2016: 268). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2016: 332) mengemukakan bahwa beberapa ahli berpendapat mengenai konsep triangulasi bahwa triangulasi membandingkan dengan berbagai teori, sumber dan metode.

Teknik triangulasi ini bertujuan untuk menguji kebenaran data dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2016: 331), yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan dibandingkan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sebuah dokumen yang berkaitan.